

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga “Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun ke 3 (tiga) dari RPJMD 2021 – 2026. Renja ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan peningkatan Kepariwisata dan Pemuda Olahraga tahun 2024 dan memberi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya terutama pada sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam menyukseskan peningkatan Pariwisata di daerah. Di ucapkan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana kerja ini dapat terselesaikan. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 8 Oktober 2024

Kepala Dinas,



ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip.19770422 199511 2 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	20
2.3 Isu-Isu Penting Permasalahan OPD	24
BAB III RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH	
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Kerja Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Tahun Berjalan

Tabel 2.1.2 Perubahan Anggaran Program/Kegiatan

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3.1 Isu Permasalahan DISPARMUDORA

Tabel 3.1.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISPARMUDORA
Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muatan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026, yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, wajib dijabarkan oleh setiap OPD dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen acuan dalam perencanaan setiap tahunnya.

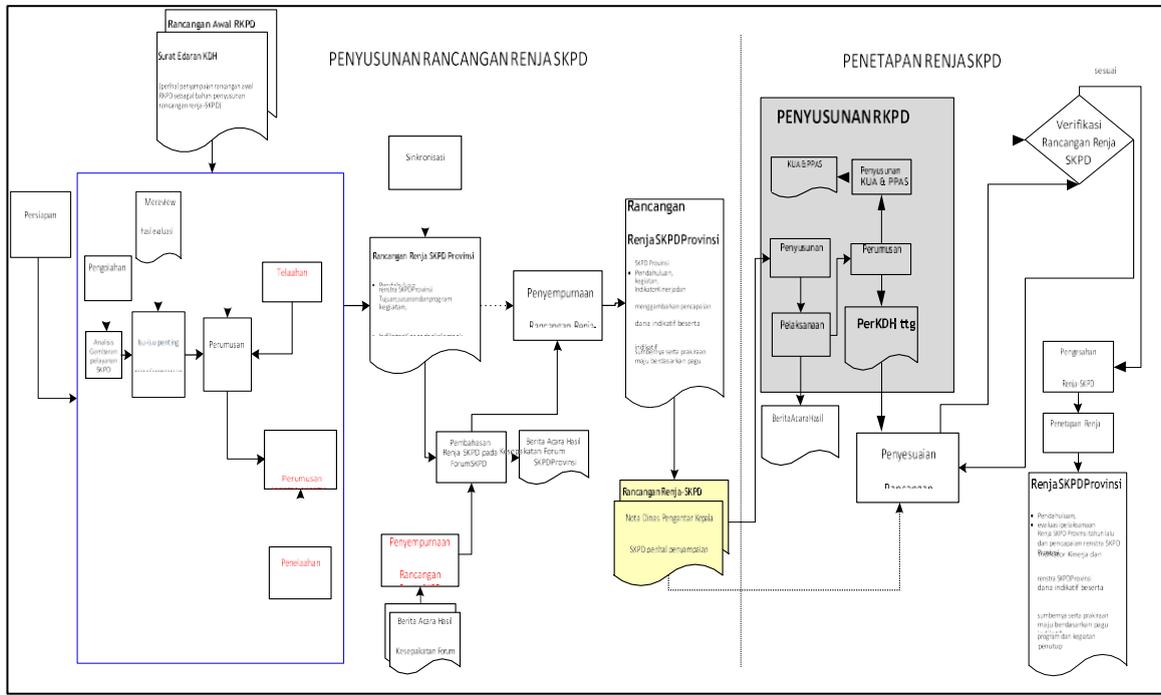
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja harus mengacuh pada Renstra OPD dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum

musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang dan berkesinambungan pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026.

Prioritas pembangunan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga difokuskan pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD tahun 2024. Penyusunan Renja OPD harus mempertimbangan RKP Nasional, RKPD

Propinsi dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur TA. 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 03);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);

21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah:

- Untuk menjabarkan program dan kegiatan RENSTRA OPD ke dalam program/kegiatan Tahunan;
- Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD, KUA PPAS RKA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024;
- Menyiapkan Kerangka valuasi Kinerja Program/Kegiatan dalam 1 Tahun;
- Membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal;

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 antara lain :

- Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;

- Terbangunnya konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan;
- Menyediakan satu tolok ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Dokumen Renja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Luwu Timur TA. 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur menetapkan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Secara umum evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023, dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja OPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak eksternal tentang sejauhmana organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2023 dapat dilihat melalui Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2021-2026 disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian
Renstra dan Perencanaan Renstra sampai dengan Tahun Berjalan**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program Kinerja (Renstra Tahun 2026 Akhir Periode RENSTRA SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)		
					Target Renja Perangka t Daerah 2022 (Tahun n- 2)	Realisasi Renja Perangka t Daerah 2022 (Tahun n- 2)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)			100 persen	3,45 perse	83%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan			100 persen	100 persen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	2 dokumen		2 dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	2 dokumen		2 dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	2 dokumen		2 dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	3 dokumen				

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	10 dokumen		10 dokumen	10 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan			100 persen	100 persen	78%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	26 org		26	57	219%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	18 dokumen		4 dokumen	1 dokumen	25%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang isusun tepat waktu dan termanfaatkan			100 persen	100 persen	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan			100 persen	100 persen	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	12 laporan		12 dokumen	12 dokumen	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	7 org		7 org	5 org	71%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang penuhi			100 persen	62,24 persen	62%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	17 jenis		17 jenis	17 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	13 unit		10 unit	7 unit	70%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	20 jenis		2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	3 jenis		3 jenis	3 jenis	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	72 eks		72 eks	55 eks	76%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	2300 org		2500 kotak	1225 kotak	49%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	77 kali		860 kali	845 kali	98%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi			100 persen	100 persen	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	1100 surat		2000 surat	2000 surat	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	72 rek/bln		48 rek/bln	50 rek/bln	104%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	18 org		18 org	18 Org	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah enunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara			100 persen	44 persen	44%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)			12 unit	12 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	50 unit		60 unit	60 unit	100%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	1 unit		1 unit	3 unit	300%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan Pembinaan organisasi Pemuda yang ada diwilayah Luwu Timur (%)			100 persen	4,18 perse	64%
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pembinaan Pemuda Pelopor dan PPAP yang ada diwilayah Luwu Timur			100 persen	64,18 persen	64%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase peningkatan Pembinaan organisasi Pemuda yang ada diwilayah Luwu Timur (%)	6 org				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Persentase peningkatan Pembinaan organisasi Pemuda yang ada diwilayah Luwu Timur (%)	35 org		26 org	26 org	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pembinaan organisasi Pemuda yang ada diwilayah Luwu Timur (%)	30 org		30 org	30 org	100%
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Persentase peningkatan Pembinaan organisasi Pemuda yang ada diwilayah Luwu Timur (%)	3 unit		4 unit	4 unit	100%
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase peningkatan Pembinaan organisasi Pemuda yang ada diwilayah Luwu Timur (%)			74 org	74 org	100%
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Pembinaan OKP di Kabupaten Luwu Timur yang berkualitas			100 persen	100 persen	100%

	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pembinaan organisasi Pemuda yang ada di wilayah Luwu Timur (%)	35 okp		30 okp	30 okp	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)			100 persen	101,2 persen	101%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Pembagunan Sarana dan Prasarana Olahraga di tiap Kecamatan/Sarana dan Prasaran yang terstandarisasi			100 persen	90 persen	90%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)	5 paket		10 unit	9 unit	90%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Peserta Olahraga Pelajar yang mengikuti Event Olahraga Pelajar di Tk. Kabupaten dan Provinsi			100 persen	75 persen	75%
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)	2 cabor		2 cabor	2 cabor	100%

	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)	80 org		80 org	80 org	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Pembinaan Atlit yang Berprestasi			100 persen	100 persen	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Olahraga di Luwu Timur			100 persen	100 persen	100%
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)	2 cabor		1 cabor	2 cabor	200%
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)	24 organisasi olahraga		24 organisasi olahraga	27 organisasi olahraga	113%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Peningkatan olahraga rekreasi yang dilaksanakan			100 persen	116 persen	116%
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)	1 cabor		4 cabor	5 cabor	125%
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang di sediakan					
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)					

	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengelolaan Database Olahraga yang ada di Luwu Timur (%)					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase gugus depan yang aktif			100 persen	100 persen	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase Sarana dan Prasarana Kepramukaan yang di bangun			100 persen	100 persen	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepramukaan yang berbasis Elektronik					
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	persentase gugus depan yang aktif	100 org		100 gugus	100 gugus	100%
	Penyedia Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat daerah	Jumlah Sarana Prasarana Kepramukaan yang dibangun/diadakan					
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan					
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Pengembangan Objek Pariwisata (%)			100 persen	88,89 persen	89%

	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatnya Penyusunan Master dan Bisnis Plan Objek Wisata			100 persen	100 persen	100%
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Pengembangan Objek Pariwisata (%)	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				100 persen	88,89 persen	89%
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Pengembangan Objek Pariwisata (%)	6 paket		9 paket	8 paket	89%
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monev dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata					
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	100%
	Penyedia Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		7 usaha		10 usaha	10 usaha	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				10 usaha	10 usaha	100%
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)			100 persen	81,82 persen	82%
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan			100 persen	82 persen	82%
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Presentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	3 jenis		jenis	6 jenis	100%

	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Presentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	5 event		3 event	1 event	33%
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Presentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Presentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	2 dokumen		1 lokasi	1 lokasi	100%
	PROGRAM PENGEM EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
	Pengembangan Ekosistem Kreatif						
	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang menerima yang dibuat/dilaksanakan					
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Koordinasi kemitraan Pembangunan Wisata (%)			100 persen	123 persen	123%

	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase Meningkatnya Koordinasi kemitraan Pembangunan Wisata			100 persen	123 persen	123%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Peningkatan Koordinasi kemitraan Pembangunan Wisata (%)	3 kelompok		3 kelompok	3 kelompok	100%
	Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		5 org		11 org	15 org	136%
	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif						
	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				3 org	3 org	100%

Program yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kebijakan Pembangunan Pariwisata, Peningkatan Wira Usaha Pemuda dan Peningkatan Atlit Berprestasi selama periode 2021 – 2026, maka ditetapkan program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 yang terkait erat dalam upaya pencapaian Pembangunan Pariwisata, Peningkatan Wira Usaha Pemuda dan Peningkatan Atlit Berprestasi di Kabupaten Luwu Timur. Program dan Kegiatan Tahun 2024 akan dilaksanakan dalam 7 Program, 20 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan terdiri dari:

➤ **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Program ini terdiri atas 5 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan Prestasi Olahraga diKabupaten/Kota dengan Indikator Persentase Tingkat Prestasi Olahraga. Realisasi kinerja sampai dengan TW II tahun 2024 sebesar 11,62% sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 2.256.058.128,- atau 42,26% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.338.404.000,-

➤ **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini terdiri atas 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dengan Indikator Persentase Tingkat Partisipasi pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mandiri. Realisasi kinerja sampai triwulan II tahun 2024 sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 709.876.370,- atau 7,31% dari pagu anggaran sebesar 9.711.374.800,-.

➤ **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Program bertujuan terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan Gugus Depan yang Aktif dengan Indikator Persentase Gugus Depan yang Aktif, untuk mencapaisasaran program tersebut. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 90% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 atau 80% dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-

➤ **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan Pengembangan Objek Wisata dengan Indikator Persentase Mneingkatnya Pengembangan Objek Wisata. Realisasi kinerja sebesar 38% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 689.407.000,- atau 21,79% dari pagu Rp. 1.064.807.000,-

➤ **Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang bertujuan

untuk Meningkatkan Pemasaran Pariwisata di Luwu Timur dengan Indikator Persentase Meningkatnya Pemasaran. Realisasi kinerja sebesar 90,91% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 117.041.525 atau 19,15% dari pagu anggaran sebesar Rp. 611.018.500,-

➤ **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif**

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Indikator Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk mencapai sasaran program tersebut. Realisasi kinerja sebesar 90,91% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.426.110,- atau 30,98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.805.000,-

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten/ Kota**

Program ini terdiri atas 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan sasaran program adalah meningkatnya rata-rata capaian kinerja pelayanan. Realisasi kinerja sebesar 55,53% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.764.142.846,- atau 38,94% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.530.323.325,-

Tabe 2.1.2 Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga TA.2024

No.	PROGRAM/KEGIATAN	APBD	APBDP	Bertambah/Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,530,323,325	Rp 4,809,577,964.00	Rp 279,254,639.00	6%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 99,969,450	Rp 157,129,450.00	Rp 57,160,000.00	36%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 52,437,450	Rp 109,597,450.00	Rp 57,160,000.00	52%	Penambahan pada Belanja Perjanjanaan Dinas Biasa
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 4,974,000	Rp 4,974,000.00	Rp -		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4,983,000	Rp 4,983,000.00	Rp -		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000.00	Rp -		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 33,575,000	Rp 33,575,000.00	Rp -		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3,355,404,798	Rp 3,279,505,237.00	-Rp 75,899,561.00	-2.31%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,286,055,748	Rp 3,176,156,187.00	-Rp 109,899,561.00	-3.46%	Pengurangan pada belanja Gaji disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2,999,050	Rp 2,999,050.00	Rp -		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 66,350,000	Rp 100,350,000.00	Rp 34,000,000.00	34%	Penambahan pada Belanja Perjanjanaan Dinas Biasa
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 20,894,050	Rp 54,244,050.00	Rp 33,350,000.00	61%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 20,894,050	Rp 54,244,050.00	Rp 33,350,000.00	61%	Penambahan pada Belanja Perjalanan Dinas biasa, Belanja mamin tamu, belanja mamin rapat, Belanja jasa Tenaga Ahli untuk inivasi Tas si dora
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 134,337,400	Rp 196,296,400.00	Rp 61,959,000.00	32%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 84,622,400	Rp 114,962,400.00	Rp 30,340,000.00	26%	Penambahan pada belanja Perjanan Dinas Biasa
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 49,715,000	Rp 81,334,000.00	Rp 31,619,000.00	39%	Penambahan pada Belanja Kursus singkat/Pelatihan dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 406,392,627	Rp 672,627,827.00	Rp 266,235,200.00	40%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4,148,100	Rp 4,148,100.00	Rp -		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 28,350,000	Rp 68,250,000.00	Rp 39,900,000.00	58%	Penambahan pada Belanja Kursi Kerja, Belanja Alat Komunikasi (Tablet) dan Belanja Personal Komputer.
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 14,270,000	Rp 14,270,000.00	Rp -	0%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19,473,900	Rp 26,973,900.00	Rp 7,500,000.00	28%	Penambahan pada Belanja Bahan Cetak (Baliho)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7,495,000	Rp 7,495,000.00	Rp -		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 24,435,000	Rp 24,435,000.00	Rp -		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 308,220,627	Rp 527,055,827.00	Rp 218,835,200.00	42%	Penambahan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 441,800,000	Rp 369,200,000.00	-Rp 72,600,000.00	-20%	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000.00	Rp -	0%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 195,800,000	Rp 164,700,000.00	-Rp 31,100,000.00	-19%	Pengurangan Belanja Penambahan daya dan Penyambungan Baru Listrik dan Pengurangan belanja tagihan listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 243,000,000	Rp 201,500,000.00	-Rp 41,500,000.00	-21%	Pengurangan pada upah Tenaga Kontrak dengan perjanjian kerja dari 24 bulan menjadi 16 Bulan, pengurangan pada jasa tenaga pengamanan dan belanja jasa tenaga informasi dan teknologi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 71,525,000	Rp 80,575,000.00	Rp 9,050,000.00	11%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 42,315,000	Rp 46,315,000.00	Rp 4,000,000.00	9%	Penambahan pada Belanja Pemeliharaan Alat angkut- alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 12,210,000	Rp 17,260,000.00	Rp 5,050,000.00	29%	Penambahan pada belanja pemeliharaan printer, laptop dan televisi.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000.00	Rp -		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 9,711,374,800	Rp 8,164,968,808.00	-Rp 1,546,405,992.00	-19%	
	Penyadaran, Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wira usaha pemula dan pemuda kader kabupaten/kota	Rp 9,066,194,800	Rp 7,462,009,808.00	-Rp 1,604,184,992.00	-21%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp 111,089,800	Rp 87,599,800.00	-Rp 23,490,000.00	-27%	Pengurangan pada belanja Cetak, Belanja jasa tata rias, Belanja Sewa Hotel dan belanja perjalanan dinas biasa
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Rp 188,327,000	Rp 176,967,000.00	-Rp 11,360,000.00	-6%	Pengurangan pada belanja Perjalanan dinas Biasa
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp 102,930,000	Rp 102,930,000.00	Rp -		
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Rp 8,663,848,000	Rp 7,094,513,008.00	-Rp 1,569,334,992.00	-22%	Pengurangan pada belanja perjalanan dinas biasa dan belanja modal lanjutan pembangunan gedung pemuda
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 645,180,000	Rp 702,959,000.00	Rp 57,779,000.00	8%	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp 645,180,000	Rp 702,959,000.00	Rp 57,779,000.00	8%	penambahan pada belanja honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja sewa alat bantu lainnya dan belanja perjalanan dinas biasa
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 5,338,404,000	Rp 5,467,719,000.00	Rp 129,315,000.00	2%	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,793,000,000	Rp 1,826,000,000.00	Rp 33,000,000.00	2%	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Rp 1,793,000,000	Rp 1,826,000,000.00	Rp 33,000,000.00	2%	penambahan pada belanja Alat tulis kantor, kertas dan cover, belanja cetak, sevenir/cendra mata, belanja honorarium, belanja sewa alat bantu lainnya, belanja sewaperalatan studio dan belanja perjalanan dinas biasa
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,185,606,000	Rp 1,271,921,000.00	Rp 86,315,000.00	7%	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kab/Kota	Rp 745,606,000	Rp 831,921,000.00	Rp 86,315,000.00	10%	Penambahan belanja Cetak, Belanja barang untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat, belanja makan dan minum tamu , pakaian olahraga, belanja jasa tenaga pendidikan dan belanja perjalanan dinas biasa
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp 440,000,000	Rp 440,000,000.00	Rp -		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp 12,500,000	Rp 22,500,000.00	Rp 10,000,000.00	44%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Rp 12,500,000	Rp 22,500,000.00	Rp 10,000,000.00	44%	Penambahan pada Belanja Perjalanan dinas biasa
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp 1,871,710,000	Rp 1,871,710,000.00	Rp -		
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Rp 121,710,000	Rp 121,710,000.00	Rp -		
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Rp 1,750,000,000	Rp 1,750,000,000.00	Rp -		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp 475,588,000	Rp 475,588,000.00	Rp -		
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Rp 90,588,000	Rp 90,588,000.00	Rp -		
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Rp 385,000,000	Rp 385,000,000.00	Rp -		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000.00	Rp -		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000.00	Rp -		
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000.00	Rp -		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 1,064,807,000	Rp 1,763,611,350.00	Rp 698,804,350.00	40%	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 647,307,000	Rp 733,860,800.00	Rp 86,553,800.00	12%	
	Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Rp 647,307,000	Rp 733,860,800.00	Rp 86,553,800.00	12%	Penambahan pada belanja Alat tulis kantor, Kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, mamin rapat, honorarium penyuluh/pendampingan, jasa tenaga ahli, belanja sewa kapal terbang, sewa hotel dan perjalanan dinas biasa
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 417,500,000	Rp 1,029,750,550.00	Rp 612,250,550.00	59%	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 417,500,000	Rp 1,029,750,550.00	Rp 612,250,550.00	59%	Penambahan pada belanja pemeliharaan Objek wisata pantai ujung suso, land mark, pemeliharaan bangunan gedung -bangunan gedung tempat kerja bangunan fasilitas umum dan perjalanan dinas biasa

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 1,211,450,000	Rp 1,175,460,000.00	-Rp 35,990,000.00	-3%	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 1,211,450,000	Rp 1,175,460,000.00	-Rp 35,990,000.00	-3%	
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 14,990,000	Rp 14,990,000.00	Rp -		
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Rp 15,476,000	Rp 15,476,000.00	Rp -		
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 319,754,500	Rp 319,764,500.00	Rp 10,000.00	0.0031 %	
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 861,229,500	Rp 825,229,500.00	-Rp 36,000,000.00	-4%	Penambahan belanja bahan pameran, bahan cetak, benja jasa tenaga ahli (video dan dokumentasi, belanja kursus singkat/pelatihan dan perjalanan dinas biasa.
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 215,490,000	Rp 215,490,000.00	Rp -		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 165,790,000	Rp 165,790,000.00	Rp -		
Pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Rp 155,810,000	Rp 155,810,000.00	Rp -		
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 9,980,000	Rp 9,980,000.00	Rp -		
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp 49,700,000	Rp 49,700,000.00	Rp -		
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Provesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Rp 49,700,000	Rp 49,700,000.00	Rp -		
	Rp 22,571,849,125	Rp 22,096,827,122.00	-Rp 475,022,003.00	-2%	

Dilihat dari tabel diatas ada terdapat beberapa sub kegiatan mengalami perubahan anggaran, baik itu bertambah dan berkurang diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, nilai pagu pokok Rp. 52.437.450 menjadi Rp. 109.597.450,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 57.160.000 atau 52% yaitu penambahan pada belanja perjalanan dinas biasa.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, nilai pagu pokok Rp. 3.286.055.748 menjadi 3.176.156.187,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 109.899.561,- atau 3,46% yaitu pengurangan pada belanja gaji di sesuaikan dengan jumlah ASN yang ada.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, nilai pagu pokok Rp. 66.350.000,- menjadi Rp. 100.350.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 34.000.000 atau 34% yaitu penambahan pada belanja perjalanan dinas biasa.
- d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, nilai pagu pokok Rp. 20.894.050,- menjadi Rp. 54.244.050,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 33.350.000 atau 61% yaitu penambahan pada belanja perjalanan dinas biasa, belanja makan minum tamu, belanja makan minum rapat, belanja jasa tenaga ahli untuk inovasi TAS SI DORA.
- e. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, nilai pagu pokok Rp. 84.622.400,- menjadi Rp. 114.962.400,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 30.340.000,- atau 26% yaitu penambahan pada belanja perjalanan dinas biasa.
- f. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan,

nilai pagu pokok sebesar Rp. 49.715.000,- menjadi Rp. 81.334.000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 31.619.000,- atau 39% yaitu penambahan pada belanja kursus singkat/pelatihan dan belanja perjalanan dinas biasa.

- g. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, nilai pagu pokok Rp. 28.350.000,- menjadi Rp. 68.250.000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 39.900.000,- atau 58% yaitu penambahan pada belanja kursi kerja, belanja alat komunikasi (tablet), dan belanja personal komputer.
- h. Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan, nilai pagu pokok Rp. 19.473.900,- menjadi Rp. 26.973.900,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- atau 28% yaitu penambahan pada belanja bahan cetak (baliho).
- i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, nilai pagu pokok Rp. 308.220.627,- menjadi Rp. 527.055.827,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 218.835.200,- atau 42% yaitu penambahan pada belanja perjalanan dinas biasa.
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, nilai pagu pokok Rp. 195.800.000,- menjadi Rp. 164.700.000,- terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 31.100.000,- atau 19% yaitu pengurangan belanja penambahan daya dan penyambungan baru listrik dan pengurangan belanja tagihan listrik.
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, nilai pagu pokok Rp. 243.000.000,- menjadi Rp. 201.500.000,- terjadi pengurangan sebesar Rp. 41.500.000 atau 21% yaitu pengurangan pada upah tenaga kontrak dengan perjanjian kerja dari 24 bulan menjadi 16 bulan, pengurangan pada jasa tenaga pengamanan dan belanja jasa tenaga informasi dan teknologi.
- l. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, nilai pagu pokok Rp. 42.315.000,- menjadi Rp. 46.315.000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- atau 9% yaitu penambahan pada belanja pemeliharaan alat angkut-alat

angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.

- m. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, nilai pagu pokok Rp. 12.210.000,- menjadi Rp. 17.260.000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 5.050.000,- atau 29% yaitu penambahan pada belanja pemeliharaan printer, laptop dan televisi.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, nilai pagu pokok Rp.111.089.800,- menjadi Rp. 87.599.800,- terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 23.490.000,- atau 27% yaitu pengurangan pada hibah belanja cetak, belanja jasa tata rias, belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas biasa.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, nilai pagu pokok Rp. 188.327.000,- menjadi Rp. 176.967.000,- terjadi pengurangan pada belanja perjalanan dinas biasa.
- c. Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota, nilai pagu pokok Rp.8.663.848.000,- menjadi Rp.7.094.513.008,- terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.569.334.993,- atau 22% yaitu pengurangan pada belanja perjalanan dinas biasa dan belanja modal lanjutan pembangunan gedung pemuda.
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, nilai pagu pokok Rp. 645.180.000,- menjadi Rp. 702.959.000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 57.779.000,- atau 8% yaitu penambahan pada belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja sewa alat bantu lainnya dan belanja perjalanan dinas biasa.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan

Prasaranan Olahraga Kabupaten/Kota, nilai pagu pokok Rp. 1.793.000.000,- menjadi Rp. 1.826.000.000,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- atau 2% yaitu penambahan anggaran pada belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, belanja cetak, souvenir/cendra mata, belanja sewa alat bantu lainnya, belanja sewa peralatan studio dan belanja perjalanan dinas biasa.

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kab/Kota, nilai pagu pokok Rp. 745.606.000,- menjadi Rp. 831.921.000 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 86.315.000 ,- atau 10% yaitu penambahan anggaran pada belanja cetak, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, belanja makan dan minum tamu, pakaian olahraga, belanja jasa tenaga pendidikan dan belanja perjalanan dinas biasa.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga, nilai pagu pokok Rp. 12.500.000 ,- menjadi Rp. 22.500.000 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- atau 44% yaitu penambahan anggaran pada belanja penambahan pada belanja perjalanan dinas biasa.

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- a. Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/Kota, nilai pagu pokok Rp. 647.307.000 ,- menjadi Rp. 733.860.000 terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 86.553.800,- atau 12% yaitu penambahan anggaran pada belanja alat tulis kantor, kertas, dan cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat, honorarium penyuluh/pendampingan, jasa tenaga ahli, belanja sewa kapal terbang, sewa hotel dan perjalanan dinas biasa.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, nilai pagu pokok Rp. 417.500.000 ,- menjadi Rp. 1.029.750.550,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 612.250.550,- atau 59% yaitu penambahan pada belanja pemeliharaan objek

wisata, pantai ujung suso, land mark, pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja bangunan fasilitas umum dan perjalanan dinas luas.

5. Program Pemasaran Pariwisata

- a. Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik dalam maupun luar negeri, nilai pagu pokok Rp. 861.229.500 ,- menjadi Rp. 825.229.500 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- atau 4% yaitu pengurangan belanja bahan pameran, bahan cetak, belanja jasa tenaga ahli (video dan dokumentasi) belanja kursus singkat/pelatihann dan perjalanandinas biasa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bisnis proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan Pemuda dan Olahraga, Urusan Pariwisata sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SPM/ STAND AR NASIO NAL	IK K	TARGET RENSTRA DISPARMUDORA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
				1	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri			35,6	37,2	38,8	40,4	42,0
				0%	2%	3%	5%	7	98%	%	3%	5%
2	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional								210	173,		
									%	33		
										%		
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan								939,	123		
									45%	2%		
4	Nilai Sakip			62	63	70	71	72	80			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu

timur serta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan publik (*public service*) dan tanggung jawab (*akuntabilitas*) dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan.

Beberapa isu strategis yang melingkupi pelaksanaan pelayanan di sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang tergambarkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Isu Permasalahan
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu timur

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur	Belum Optimalnya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi	Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
		Belum optimalnya pembinaan OKP dan Organisasi Keolahragaan
		Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan
		peran serta kepemudaan

Belum optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah	Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal	Masih rendahnya pengembangan daya tarik wisata
		Masih kurangnya sarana dan prasarana objek wisata

		Kurangnya pameran produksi unggulan dan objek daya tarik wisata keluar daerah
		Kemitraan antara pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada pada Dinas pariwisata, kepemudaan dan Olahraga kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok pemerintahan dan Pembangunan sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah factor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki dan merupakan kelebihan oraganisasi secara internal. Kekuatan Dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga kabupaten luwu timur antara lain adalah :

- a. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
- b. Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya peraturan daerah yang menjadi dasar pembentukan, tugas dan fungsi organisasi serta peraturan daerah lainnya yang menunjang kebijakan pengelolaan kegiatan pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- d. Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas

pariwisata, kepemudaan dan olahraga;

- e. Inovasi kegiatan berupa Pembangunan dan Pengembangan system informasi manajemen kepegawaian;
- f. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;
- g. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
- h. Adanya iklim kinerja yang kondusif di dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah factor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara internal/bersifat kedalam, Adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur antara lain :

- a. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kualitas, kuantitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas;
- c. Belum adanya system pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui system karier berbasis kinerja;
- d. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan;
- e. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan Pendidikan dan pelatihan pegawai, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran;
- f. Kurangnya penguasaan pegawai dibidang teknologi informasi;
- g. Masih ditemukannya budaya kerja pegawai/pegawai ASN yang bekerja menunggu perintah atasan dan tidak memahami tugas pokok dan fungsi.

3. Peluang (Opportunity)

- a. Adanya kebijakan pemerintah dalam Upaya menciptakan system penyelenggaraan tata cara pemerintahan yang baik dan akuntabel (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance);
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar pegawai ASN berdisiplin dan

professional;

- c. Adanya komitmen untuk menegakkan disiplin aparatur pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta makin kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan good governance;
- d. Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah;
- e. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan;
- f. Menguatnya tuntutan Masyarakat terhadap.

4. Tantangan (Threat)

- a. Perubahan dan perkembangan teknologi dan permasalahan di Masyarakat yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
- b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat;
- c. Era golablisasi dan kemajuan iptek yang menuntut perkembangan system pelayanan Masyarakat perikanan semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
- d. Kurangnya Tingkat partisipasi stakeholder di dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk pelayanan Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
- e. Belum optimalnya Pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2024 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga direncanakan melaksanakan 7 Program, 20 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 22.096.827.122,-. Alokasi program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1.1

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan ini.

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka pada Tahun Anggaran 2024, Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan sebanyak 7 Program yang akan diakselarasikan dengan visi misi Bupati terpilih serta RPJP Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang

berlaku.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Perubahan ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan di masa mendatang akan lebih baik.